



PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN: PENDEKATAN STUDI EKONOMI IBN KHALDUN

Noviendri Djalil^{1(*)}

¹Universitas YARSI, Jakarta

Abstract

The need for a more holistic and ethical development paradigm has intensified as a result of the global crisis characterized by economic inequality, environmental degradation, and the dominance of a materialistic development paradigm. The purpose of this study is to examine Ibn Khaldun's economic theory and re-integrate it into the context of sustainable economic development. This study analyzes Ibn Khaldun's major work, the Muqaddimah, and compares it with the principles of sustainable development found in the Sustainable Development Goals (SDGs). This study uses a qualitative approach and library research methods. The study shows that Ibn Khaldun's ideas, particularly the concept of umran (civilization), fiscal justice, work ethics, and the proportional role of the state, align with the pillars of sustainable development that emphasize the balance between economic growth, social welfare, and system sustainability. Ibn Khaldun also placed moral values as the foundation of a standard for development focused on economic growth and long-term well-being. According to this study, Ibn Khaldun's ideas should be incorporated into a modern Islamic economic framework and utilized in public policymaking focused on multidimensional sustainability.

Kata Kunci: Ibn Khaldun, ekonomi Islam, pembangunan berkelanjutan, umran

Januari – Juni 2026, Vol 15 (1): hlm 37-45
©2026 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
All rights reserved.

(*) Korespondensi: novdjalil@gmail.com (N. Djalil)

PENDAHULUAN

Berbagai krisis global yang terjadi dewasa ini, seperti meningkatnya ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan hidup, serta ketergantungan berlebihan pada pertumbuhan ekonomi yang bersifat materialistik, telah mendorong para pemikir dan pelaku pembangunan untuk merumuskan pendekatan alternatif yang lebih menyeluruh. Konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis telah menjadi kerangka dominan dalam diskursus kebijakan pembangunan global. Akan tetapi, implementasinya di banyak negara masih berakar pada paradigma kapitalisme konvensional yang belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pokok, terutama dalam hal distribusi keadilan dan penguatan nilai-nilai sosial (Arifqi, 2019).

Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengeksplorasi kembali warisan intelektual dunia Islam sebagai sumber konseptual alternatif. Salah satu tokoh penting yang layak dikaji adalah Ibn Khaldun, seorang cendekiawan Muslim dari abad ke-14 yang dikenal sebagai pionir dalam bidang sosiologi dan ekonomi politik. Dalam karyanya *Muqaddimah*, ia menawarkan suatu pendekatan interdisipliner yang menghubungkan dinamika ekonomi dengan etika, kekuasaan politik, dan struktur sosial masyarakat (Rizal, 2020; Septianingrum et al., 2025).

Pemikiran Ibn Khaldun mengandung dimensi filosofis yang sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan modern. Melalui konsep umran (peradaban), ia menekankan pentingnya relasi yang harmonis antara kepentingan individu dan kolektif, keseimbangan dalam penggunaan sumber daya, serta peran negara dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial (Amirullah & Rohman, 2024). Kritiknya terhadap kebijakan fiskal yang eksploitatif, seperti pajak berlebihan yang menurunkan produktivitas rakyat, menunjukkan kepekaannya terhadap isu keadilan ekonomi yang kini menjadi sorotan global (Hasibuan, 2011).

Sejumlah studi kontemporer menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Mafrudlo et al. (2024) mengemukakan bahwa pemikirannya sejalan dengan gagasan tentang pembangunan berbasis keadilan, pelestarian sumber daya, dan kesejahteraan jangka panjang. Selain itu, Muchlisin & Mugiyati (2025) menekankan pentingnya dimensi spiritual dan moral dalam pemikiran Ibn Khaldun sebagai kerangka alternatif untuk memahami pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberkahan dan keadilan.

Lebih lanjut, Lubis et al. (2024) menggarisbawahi bahwa pemikiran para cendekiawan klasik seperti Ibn Khaldun, Al-Ghazali, dan Al-Syatibi membawa fondasi etis dan spiritual yang kuat, yang dapat memperkaya pendekatan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang selama ini didominasi oleh pendekatan materialistik.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi ideologi ekonomi Ibn Khaldun dari berbagai sudut pandang, seperti konsep pertumbuhan ekonomi, keadilan fiskal, dan peran negara dalam pembangunan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif-historis dan belum secara sistematis menghubungkan konsep-konsep ekonomi Ibn Khaldun

dengan kerangka pembangunan berkelanjutan dalam konteks kontemporer. Selain itu, integrasi antara gagasan Ibn Khaldun dengan kerangka global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) juga masih relatif terbatas dalam literatur akademik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara konseptual keterkaitan antara pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan paradigma pembangunan yang lebih berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kontribusi pemikiran Ibn Khaldun dalam merumuskan paradigma pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka, yang fokus pada analisis konsep-konsep utama dalam *Muqaddimah* dan membandingkannya dengan literatur kontemporer terkait pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) dengan tujuan menelaah secara konseptual pemikiran ekonomi Ibn Khaldun serta relevansinya dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini fokus pada kajian terhadap gagasan, konsep, dan interpretasi terhadap teks-teks ilmiah, sehingga peneliti dapat menganalisis fenomena secara kontekstual dan interpretatif (Creswell & Creswell, 2018). Sementara metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini menelaah pemikiran tokoh klasik yang tertuang dalam karya-karya ilmiah serta membandingkannya dengan literatur kontemporer. Studi pustaka merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai objek utama analisis untuk memperoleh telaah teoritis yang komprehensif terhadap suatu konsep atau pemikiran (Poltak & Widjaja, 2024).

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya utama Ibn Khaldun, yaitu *Muqaddimah*, yang memuat konsep-konsep dasar mengenai dinamika peradaban (*umran*), peran negara, etika kerja, serta kebijakan fiskal dalam pembangunan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur akademik yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas pemikiran ekonomi Ibn Khaldun, ekonomi Islam, serta konsep pembangunan berkelanjutan (El-Kholei, 2019; Ramli, et al. 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dengan tema penelitian, kredibilitas sumber, serta kontribusinya dalam

menjelaskan hubungan antara pemikiran Ibn Khaldun dan konsep pembangunan berkelanjutan (Sugiyono, 2019).

Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif-analitis dan interpretatif dengan tahapan berikut: pertama, peneliti mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep-konsep penting dalam pemikiran ekonomi Ibn Khaldun yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat, seperti konsep *umran*, keadilan fiskal, peran negara, serta etos kerja. Pada tahap kedua, konsep-konsep tersebut dianalisis secara interpretatif dengan membandingkannya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan analisis konseptual bertujuan untuk membangun sintesis teoretis antara pemikiran ekonomi klasik dan paradigma pembangunan kontemporer (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibn Khaldun dikenal sebagai tokoh multidisipliner yang merumuskan pandangan ekonomi secara terintegrasi dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Dalam *Muqaddimah*, ia menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu masyarakat tidak hanya bergantung pada kekayaan alam atau teknologi, tetapi sangat ditentukan oleh sistem sosial yang stabil, tata kelola politik yang adil, serta etos kerja yang kuat dalam masyarakat (Rizal, 2020).

Konsep sentral yang dikembangkan Ibn Khaldun adalah *umran*—yakni peradaban sebagai hasil interaksi produktif antara manusia dan lingkungannya. Pertumbuhan peradaban menurutnya sangat ditentukan oleh kerja keras, keadilan dalam kebijakan publik, dan kemakmuran yang didistribusikan secara proporsional (Mafrudlo et al., 2024). Dengan demikian, ekonomi dalam pandangan Ibn Khaldun bersifat normatif dan berlandaskan nilai moral.

Salah satu kontribusi penting lainnya adalah kritiknya terhadap kebijakan perpajakan yang berlebihan. Pajak tinggi, menurut Ibn Khaldun, akan menghambat kegiatan ekonomi dan pada akhirnya mempercepat keruntuhan negara. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran negara yang tidak eksploitatif dan berpihak pada produktivitas rakyat (Hasibuan, 2011).

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan pendekatan yang menekankan keberimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan. Konsep ini dipopulerkan melalui inisiatif *Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh PBB, yang menuntut adanya strategi pembangunan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup generasi masa depan.

Namun demikian, praktik pembangunan di banyak negara masih dominan menggunakan paradigma ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada pertumbuhan angka dan sering kali mengabaikan distribusi kesejahteraan serta dampak ekologisnya. Oleh karena itu, muncul gagasan bahwa pembangunan berkelanjutan perlu dibangun di atas fondasi nilai-nilai etika dan spiritual yang kuat (Muchlisin & Mugiyati, 2025).

Sebagian peneliti menilai bahwa nilai-nilai dalam Islam, termasuk dalam pemikiran Ibn Khaldun, memiliki keselarasan yang tinggi dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti keadilan sosial, keseimbangan lingkungan, dan tanggung jawab antargenerasi (Amirullah & Rohman, 2024).

Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa terdapat titik temu yang kuat antara gagasan ekonomi Ibn Khaldun dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mafrudlo et al. (2024) menunjukkan bahwa Ibn Khaldun memandang kemakmuran sebagai hasil dari interaksi harmonis antara institusi politik yang adil, masyarakat yang produktif, dan tatanan sosial yang stabil.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Septianingrum et al. (2025) yang menyatakan bahwa filosofi Ibn Khaldun mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta mendorong sistem distribusi kekayaan yang adil, semuanya merupakan aspek fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks lebih luas, Lubis et al. (2024) menekankan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik, termasuk Ibn Khaldun, menawarkan nilai-nilai moral dan kerangka etika yang dapat memperkaya pendekatan pembangunan masa kini yang masih sangat teknokratis dan materialistik.

Dari berbagai studi, dapat disarikan beberapa poin penting: *Pertama*, Pemikiran Ibn Khaldun telah banyak dikaji dalam konteks teori pertumbuhan dan tata kelola ekonomi berkeadilan; *Kedua*, Terdapat pengakuan luas bahwa nilai-nilai yang dibawa, seperti keadilan fiskal, produktivitas, dan stabilitas sosial-politik, memiliki korelasi kuat dengan dimensi pembangunan berkelanjutan; *Ketiga*, Namun, kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan pemikiran Ibn Khaldun ke dalam kerangka SDGs masih relatif terbatas, sehingga membuka ruang kontribusi akademik yang lebih luas dalam penelitian ini.

Teori *umran* Ibn Khaldun menjelaskan bagaimana peradaban dibangun melalui kegiatan ekonomi yang produktif, tata kelola negara yang adil, serta hubungan sosial yang stabil. Ibn Khaldun menyatakan bahwa keberlangsungan sebuah peradaban bergantung pada sejauh mana masyarakat menjaga etos kerja, keadilan fiskal, serta legitimasi politik (Rizal, 2020).

Dalam teori ini, negara memiliki peran sentral sebagai fasilitator yang memastikan distribusi kekayaan secara proporsional, bukan sebagai entitas pemungut pajak yang memberatkan. Ketika keadilan terabaikan dan korupsi merajalela, produktivitas menurun dan peradaban akan mengalami kemunduran (Hasibuan, 2011).

Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks SDGs, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi harus memperhatikan kesinambungan manfaat bagi generasi mendatang.

Menurut Muchlisin & Mugiyati (2025), dimensi spiritual dan moral harus diletakkan sebagai fondasi agar pembangunan tidak hanya sukses secara material, tetapi juga etis dan manusiawi. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut tata kelola yang inklusif, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

Dari kedua kerangka di atas, dapat disusun sintesis yang menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun secara konseptual sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tabel berikut merangkum korelasi keduanya:

Tabel 1. Korelasi Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun dan Pembangunan Berkelanjutan

Pemikiran Ibn Khaldun	Padanan dalam Pembangunan Berkelanjutan
Etos kerja dan produktivitas	Pertumbuhan ekonomi inklusif
Keadilan distribusi kekayaan	Reduksi kemiskinan dan ketimpangan sosial
Pemerintah yang adil dan bijak	Tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab
Ketahanan peradaban (<i>umran</i>)	Keberlanjutan antar generasi

Pemikiran ekonomi Ibn Khaldun merefleksikan hubungan erat antara aktivitas ekonomi, moralitas masyarakat, dan stabilitas kekuasaan politik. Dalam *Muqaddimah*, ia menjelaskan bahwa kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari harmoni antara struktur sosial yang adil, produktivitas individu, dan tata kelola pemerintahan yang bijaksana (Rizal, 2020).

Konsep sentral Ibn Khaldun adalah *umran*, peradaban sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungannya melalui kerja keras, etika, dan kepemimpinan yang adil. Ia menekankan bahwa suatu negara akan kuat apabila rakyatnya produktif dan tidak dibebani oleh pajak yang berlebihan. Pajak yang tinggi menurutnya justru akan melemahkan inisiatif ekonomi masyarakat dan menurunkan pendapatan negara dalam jangka panjang (Hasibuan, 2011).

Mafrudlo et al. (2024) menambahkan bahwa Ibn Khaldun memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, bukan semata pencapaian keuntungan. Ia mendorong prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan dan partisipasi aktif negara dalam memastikan kesejahteraan bersama, yang selaras dengan prinsip *al-maslahah al-'ammah* (kepentingan umum).

Pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Meskipun Ibn Khaldun tidak menggunakan istilah kontemporer seperti “sustainability,” prinsip-prinsip yang ia anut dalam membangun peradaban secara tidak langsung mencerminkan pendekatan tersebut (Muchlisin & Mugiyati, 2025).

Aspek ekonomi dalam pemikirannya tercermin melalui dorongan terhadap produktivitas dan keseimbangan distribusi. Dimensi sosial tampak dalam perhatiannya terhadap solidaritas kolektif (*asabiyyah*) dan pentingnya keteraturan hukum serta pemerintahan yang adil. Sedangkan aspek keberlanjutan muncul dalam upaya menjaga stabilitas peradaban melalui tata kelola yang etis dan bertanggung jawab (Lubis et al., 2024).

Seperti dicatat oleh Septianingrum et al. (2025), pandangan Ibn Khaldun tetap relevan di tengah tantangan kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan struktural, dan disfungsi kelembagaan. Konsepsi tentang keterkaitan antara moral, politik, dan ekonomi menjadikan gagasannya layak dijadikan referensi normatif dalam pembangunan modern.

Untuk mengkaji relevansi pemikiran Ibn Khaldun terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berikut adalah perbandingan antara konsep utama Ibn Khaldun dan pilar SDGs:

Tabel 2. Perbandingan Konsep Ibn Khaldun dan Pilar SDGs

Aspek Konseptual	Ibn Khaldun	Pilar SDGs/Tujuan Global
Keadilan dalam ekonomi	Negara wajib menjaga distribusi kekayaan yang adil; pajak tidak boleh menekan rakyat (Hasibuan, 2011)	SDG 1 dan 10: Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi
Produktivitas dan kerja	Pekerjaan produktif adalah sumber kemakmuran dan stabilitas (Mafrudlo et al., 2024)	SDG 8: Pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak
Fungsi negara	Pemerintah harus menjaga stabilitas, etika, dan keseimbangan sosial (Rizal, 2020)	SDG 16: Pemerintahan efektif dan akuntabel
Kohesi sosial dan stabilitas	Asabiyyah sebagai dasar ketertiban sosial dan keberlangsungan kekuasaan (Amirullah & Rohman, 2024)	SDG 11 & 16: Komunitas yang inklusif dan damai
Keberlanjutan peradaban (<i>umran</i>)	Pembangunan harus menjaga kesinambungan nilai, sistem, dan moral lintas generasi	Seluruh prinsip SDGs (lintas sektor dan waktu)

Dalam konteks kekinian, pemikiran Ibn Khaldun menawarkan kerangka filosofis yang sangat relevan untuk merumuskan pembangunan yang lebih etis, adil, dan inklusif. Ketika banyak model pembangunan modern terlalu teknokratis dan berorientasi pada angka-angka pertumbuhan, pendekatan Ibn Khaldun menawarkan dimensi moral dan sosial sebagai dasar keberlanjutan (Muchlisin & Mugiyati, 2025).

Ia menempatkan moralitas sebagai elemen tak terpisahkan dari kekuatan ekonomi dan politik, dan karena itu, pembangunan yang mengabaikan etika berisiko menciptakan kehancuran sistemik. Gagasan tentang pajak yang wajar, distribusi yang seimbang, dan tanggung jawab negara terhadap rakyat menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun dapat digunakan sebagai rujukan alternatif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan (Septianingrum et al., 2025).

Dengan demikian, pendekatan Ibn Khaldun dapat dijadikan sebagai basis konseptual untuk memperkuat pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya menargetkan kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan sosial, spiritual, dan peradaban secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap pemikiran ekonomi Ibn Khaldun dan keterkaitannya dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkembang dalam wacana ekonomi kontemporer. Melalui konsep *umran*, Ibn Khaldun menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari sistem sosial, moral, dan politik yang saling berkaitan dalam membangun peradaban yang stabil dan sejahtera.

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa prinsip dalam pemikiran Ibn Khaldun, seperti pentingnya etos kerja, keadilan dalam distribusi kekayaan, serta peran negara yang adil dan tidak eksploitatif, memiliki kesesuaian dengan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan ketimpangan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pemikiran Ibn Khaldun dapat dipandang sebagai salah satu landasan konseptual yang relevan dalam merumuskan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial, stabilitas institusi, dan keberlanjutan peradaban.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus ekonomi pembangunan dengan mengintegrasikan pemikiran ekonomi Islam klasik ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan kontemporer. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada kajian konseptual berbasis studi pustaka. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris atau model analitis yang lebih operasional guna menguji relevansi pemikiran Ibn Khaldun dalam praktik kebijakan pembangunan ekonomi pada konteks masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, M., & Rohman, P. S. (2024). Ontologi Ekonomi Islam Ibn Khaldun: Sebuah Pendekatan Holistik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 7(2), 93–104.
- Arifqi, Moh. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). *Al-Tijary*, 4(2), 125–138. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- El-Kholei, A. O. (2019). Ibn Khaldun's 'ilm al 'umran: a model for planning the sustainable city in the Arab region. *Archnet-IJAR: International Journal of*

- Architectural Research*, 13(2), 276-293. <https://doi.org/10.1108/ARCH-01-2019-0004>
- Hasibuan, M. L. (2011). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibn Khaldun*
- Lubis, I. F., Tarigan, A. A., & Ridwan, M. (2024). Kontinuitas dan Perubahan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Abad Pertengahan (850-1350H/1446-1932M). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 9, No. 3.
- Mafrudlo, A. M., Mansur, Z. A., Mustofa, M., & Janwari, Y. (2024). Economic Development Theory of Ibnu Khaldun: Interrelation between Justice and Umran al-Alam. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 43-70. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20552>
- Muchlisin, M. C., & Mugiyati. (2025). Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman The Relevance of Sustainable Economic Development Dimensions (SDGs) in the Perspective of Ibn Khaldun's Thought. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 14. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14.i1.1535>
- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering*, 2(1), 31-34.
- Ramli, R., Ismail, A. G., Alias, M. S., & Sulaiman, N. A. A. (2025). Ibn Khaldun's Thoughts on Sustainable Development. *International Journal of Islamic Thought*, 28. <https://doi.org/10.24035/ijit.28.2025.342>
- Rizal, S. (2020). *Faktor Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ibn Khaldun*.
- Septianingrum, D., Sembiring, H., Haririe, M. F., Harahap, S., & Hayati, F. (2025). Konsep Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Keterkaitannya dengan Teori Masa Kini (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab Muqaddimah). *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING, Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.